


FORUM MANGUNWIJAYA III

A portrait of an elderly man with white hair, a goatee, and glasses, wearing a dark shirt. He is looking slightly to the right of the camera.

NEGARA MINUS NURANI

ESAI-ESAI KRITIS KEBIJAKAN PUBLIK

Pendahuluan: Prof Dr A Sudiarja SJ

2023
FORUM

DEMOKRASI PROTEKTIF, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN YANG MEMIHAK RAKYAT

Heru Nugroho

Sebagai suatu bangsa yang berdaulat, Indonesia sudah mengalami perjalanan yang cukup panjang dalam upaya mengisi dan memaknai kemerdekaan yang telah diraihinya. Tepatnya 63 tahun sudah bangsa ini merdeka dari cengkeraman kaum kolonial (Belanda dan Jepang), namun tampaknya masih harus menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang berkaitan dengan masalah-masalah kesejahteraan sosial seperti ketimpangan pendidikan, kesehatan dan jaminan hidup yang kurang layak bagi sebagian besar rakyatnya. Ironisnya, apabila dibandingkan dengan kondisi negara-negara jiran seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan lain-lain yang nota bene juga pernah mengalami masa-masa panjang kolonial, jaminan hidup dan kesejahteraan sosial rakyat kita jauh tertinggal. Ini artinya bahwa pemerintahan atau negara yang selama ini dipercaya oleh rakyatnya sebagai pengelola sumber-sumber daya nasional cenderung gagal dalam fungsinya sebagai redistributor.

Yang lebih memprihatinkan lagi adalah bersamaan dengan itu negara kita baru saja merayakan secara gegap gempita peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional yang ditandai dengan pesta akbar dengan logika 'colosseum' di stadion Senayan. Maksudnya, di tengah keterpurukan bangsa Indonesia yang didera oleh masalah-masalah krisis ekonomi yang tak berkesudahan, korupsi yang masih merajalela, pengangguran terbuka dan terselubung, rontoknya daya saing internasional, kemahalan biaya pendidikan dan kesehatan, dan lain-lain pemerintah melakukan politik pencitraan peringatan hari Kebangkitan Nasional secara megah dengan biaya miliaran rupiah agar persoalan-persoalan krisis multidimensional menjadi kabur. Lebih ironis lagi pada tahun yang sama kita juga memperingati 80 tahun Sumpah Pemuda dan 10 tahun Reformasi.

Seakan-akan lengkap sudah penderitaan bangsa ini karena setelah sekian lama berupaya mengisi dengan berbagai program pembangunan kemerdekaan ternyata masih jauh dari cita-cita bangsa. Terjadi diskrepansi antara harapan yang diletakkan oleh para pendiri republik ini yang tertuang dalam rumusan formal ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kenyataan yang dihadapi oleh generasi saat ini. Negara-negara jiran tersebut dalam waktu yang relatif singkat dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, seperti salah satu indikatornya penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang terjangkau oleh setiap warganya, namun kenyataan di negara kita justru pelayanan pendidikan yang semakin timpang. Seharusnya, sebagai bangsa dan negara yang usianya semakin matang negara ini menjadi semakin kokoh dan gigih dalam merealisasikan cita-cita bersama yang diru-

muskan secara formal tersebut. Tidak mudah mencari akar penyebab persoalan tersebut, namun rezim-rezim politik yang silih berganti hingga pemerintahan saat ini dapat dijadikan sebagai tersangka utama oemicu persoalan tersebut.

Kewajiban rezim-rezim politik dari zaman Orde Lama, Orde Baru hingga saat ini seharusnya merealisasikan cita-cita yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 tersebut. Secara mendetail cita-cita itu tertuang dalam Pasal 33 dan 34 dari UUD 1945 yang secara ringkas menegaskan bahwa negara berperan dalam mengelola sumber daya-sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak agar terdistribusi secara adil dan menciptakan jaminan sosial bagi seluruh warganya secara merata. Sebetulnya harapan yang dirumuskan secara formal tersebut ingin mewujudkan negara kesejahteraan atau yang populer disebut dengan *welfare state*, dimana negara memiliki peran penting sebagai institusi yang melakukan fasilitasi, regulasi, dan redistribusi sumber-sumber daya agar kesejahteraan dan keadilan sosial dapat terwujud secara nyata dalam masyarakat. Dalam sistem negara kesejahteraan sektor pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial merupakan sektor-sektor yang diproteksi oleh negara. Negara mengatur agar seluruh rakyat dari segala lapisan, etnis, dan agama memiliki akses yang sama terhadap sektor-sektor tersebut. Asumsinya adalah kalau sektor-sektor itu dapat diakses secara merata oleh setiap warga, maka keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Ironisnya, pada saat ini sebagian besar warga masyarakat merasa bahwa hidup di negeri yang memiliki cita-cita luhur tersebut semakin lama menjadi sema-

kin susah. Cita-cita yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial terlihat seolah-olah semakin hari semakin menjauh, bahkan ada kecenderungan menjadi utopia. Menurut pengakuan mereka hidup di era Orde Lama secara ekonomi memang relatif susah, namun pada waktu itu negara dapat menyediakan pendidikan yang terjangkau oleh rakyatnya baik di tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Ada pula yang menyatakan bahwa di daerah pedesaan pendidikan dilakukan secara gratis dan beberapa perlengkapan siswa (buku, alat-alat tulis) memperoleh subsidi dari pemerintah. Oleh karena itu, rakyat yang memiliki kehendak untuk bersekolah dapat memperoleh pelayanan tersebut dengan mudah. Sungguh ironis, suatu rezim pemerintahan yang memiliki konotasi "hidup di era yang serba susah" namun dapat memberi jaminan sosial rakyatnya yang secara relatif lebih baik daripada saat ini.

Sedang pada masa pemerintahan Orde Baru biaya untuk membeli pelayanan pendidikan yang di keluarkan oleh warga relatif lebih murah daripada pas-cakejatuhan rezim ini. Untuk pendidikan dasar ada kebijakan wajib belajar (program wajib belajar) bagi lapisan masyarakat miskin sehingga banyak SD Inpres didirikan untuk memudahkan akses belajar bagi masyarakat di pedesaan. Sepanjang perjalanan pemerintahan Orde Baru kondisi ekonomi nasional juga ada pasang surutnya, namun institusi pendidikan masih dapat dijadikan sebagai sarana untuk mobilitas sosial atau mengubah nasib. Biaya pendidikan yang relatif terjangkau oleh sebagian besar warga negara menjadikan institusi ini sebagai sarana mobilitas sosial

individu untuk menaiki tangga sosial yang lebih baik. Banyak cerita konkret yang dialami oleh rakyat miskin yang dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi sehingga setelah tamat dapat memperoleh pekerjaan yang baik dan secara ekonomi nasibnya menjadi lebih baik. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa institusi pendidikan pada masa itu menjadi alat reproduksi kekuasaan dari sistem pemerintahan yang otoriter dengan kontrol yang ketat terhadap kurikulum oleh negara.

Kalau kita simak masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru secara sederhana dapat dikatakan, meskipun cara ini disadari menjadi sangat reduksionis, bahwa posisi hubungan antara warga dan negara sangat jelas yaitu negara menjadi institusi yang dominan dalam mendistribusikan sumber-sumber daya yang ada bagi warga masyarakat. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing rezim tersebut negara tetap menjadi institusi penting dalam hal menjamin warganya untuk dapat memperoleh pelayanan pendidikan bahkan kesehatan dan subsidi-subsidi lainnya. Pemerintah sadar bahwa tanpa intervensinya di sektor pelayanan publik dalam hal ini sektor pendidikan, rakyat tidak akan dapat memperoleh fasilitas pelayanan pendidikan secara memadai. Pada masa pemerintahan Orde Baru pelayanan pendidikan dibedakan menjadi dua, yaitu pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh negeri dan swasta. Kedua-duanya tetap diberikan subsidi oleh pemerintah meskipun dengan porsi yang lebih besar terhadap pelayanan pendidikan negeri. Dampaknya pelayanan pendidikan negeri lebih murah daripada pelayanan pendidikan yang

diselenggarakan oleh swasta, meskipun secara relatif kedua-duanya masih dapat dijangkau oleh rakyat.

Hingga perkembangan saat ini, yaitu masa pemerintahan pascakejatuhan Orde Baru atau yang populer disebut dengan era Reformasi masih menyisakan warisan problem besar krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kebijakan ekonomi pemerintahan duet SBY-JK cenderung semakin liberal di tengah ketidakberdayaan masyarakat lapis bawah terhadap terpaan ekonomi pasar bebas yang semakin merasuk ke dalam segenap sektor kehidupan. Kebijakan ekonomi pemerintah yang cenderung ditekan oleh kekuatan-kekuatan global tersebut dinamakan kebijakan yang berbasis pada minimalisasi peran negara dan maksimalisasi peran swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinamakan kebijakan neo-liberalisme. Asumsinya, kalau pelayanan publik diserahkan pada swasta maka akan terjadi kompetisi yang sehat, efisiensi dan perbaikan kualitas pelayanan. Maka, untuk mempercepat hal itu diperlukan langkah-langkah seperti privatisasi atau swastanisasi. Subsidi yang selama ini diberikan oleh negara dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, energi, dan pertanian setahap demi setahap dipangkas.

Dengan alasan yang sangat sederhana bahwa negara tidak memiliki sumber keuangan yang cukup lagi, tanpa dilihat faktor korupsi sebagai biang keladinya, maka subsidi untuk berbagai kepentingan publik dikurangi (tidak bertambah) sehingga sektor-sektor tertentu (termasuk sektor pendidikan) diberikan kewenangan untuk mencari/menarik dana secara langsung dari masyarakat. Kasus yang paling konkret adalah untuk menyelamatkan APBN dari kebangkrutan, maka subsidi BBM dikurangi dengan cara menaikkan harga

BBM tersebut secara berangsur-angsur hingga menyesuaikan harga BBM di tingkatan pasar global. Terjadilah efek berantai sebagai akibat kenaikan harga BBM tersebut yaitu memicu kenaikan harga-harga komoditi sembako maupun komoditi sekunder lainnya, sementara tingkat pendapatan masyarakat relatif tetap, sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat lapis menengah ke bawah. Maka, tidak mengherankan kalau pemiskinan massal merupakan fenomena yang merebak di mana-mana di Tanah Air saat ini.

Sektor pendidikan tidak luput dari hantaman kebijakan yang liberal tersebut. Liberalisasi di bidang pendidikan secara nyata ditandai dengan diberikannya hak kepada institusi-institusi pendidikan baik dari tingkat dasar, menengah hingga pendidikan tinggi untuk menarik dana secara langsung dari masyarakat (siswa dan mahasiswa) dalam upaya memenuhi biaya pelayanan yang memadai. Akibatnya, biaya pendidikan menjadi menggelembung dan ada kecenderungan terjadinya komersialisasi pendidikan di berbagai tingkatan. Biaya untuk masuk ke dunia pendidikan dan biaya SPP (dan biaya-biaya operasional pendukungnya) menjadi mahal sehingga banyak warga masyarakat yang tidak bisa membayarnya. Frustrasi sosial akibat kemahalan biaya pendidikan salah satunya ditandai dengan rangkaian tindakan nekat bunuh diri oleh sejumlah siswa dari kalangan miskin yang merasa malu dengan teman-temannya karena tidak mampu membayar SPP. Selain itu fenomena frustrasi yang lain adalah gejala putus sekolah/kuliah yang dialami oleh masyarakat lapis bawah karena biaya pendidikan yang semakin mahal.

Di beberapa institusi pendidikan memang ada pemberian beasiswa kepada siswa atau mahasiswa

yang tidak mampu, namun ini sifatnya terbatas bagi mereka yang memiliki prestasi dan cenderung menjadi politik pencitraan institusional (baik negara atau sekolah). Bagaimana mungkin seorang siswa/mahasiswa yang berasal dari lapisan keluarga miskin yang memiliki keterbatasan fasilitas pendukung bersaing dengan mereka yang dari lapisan kaya sehingga bisa memiliki prestasi yang luar biasa? Cerita sukses tentang seorang anak yang berasal dari keluarga miskin dan memiliki prestasi yang mengagumkan di bidang pendidikan memang ada, tetapi bukan merupakan kecenderungan umum dan tidak pernah ada data statistiknya. Adalah logis kalau fenomena seperti itu diduga probabilitasnya hanya seribu dibanding satu. Siswa dan mahasiswa yang berasal dari lapisan sosial menengah ke atas seperti yang memiliki fasilitas pendidikan yang memadai (uang, buku, komputer, kunjungan ke perpustakaan, kunjungan ke toko buku, akses internet dan perpustakaan, waktu luang yang memadai) cenderung memiliki probabilitas untuk sukses. Pandangan yang menekankan bahwa meskipun seorang siswa/mahasiswa tersebut berasal dari keluarga miskin, tetapi kalau mau bekerja keras maka dapat berprestasi dinamakan sebagai mitos tentang "ideologi bakat" dan hal ini telah ditentang oleh sosiolog Bourdieu.¹

Mitos tentang ideologi bakat yang dianut oleh para pengambil kebijakan pendidikan di Tanah Air cenderung melanggengkan asumsi bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan pendidikan, walaupun kenyataannya tidak. Kisah-kisah sukses seorang siswa dari keluarga

¹ Lihat: Haryatmoko, "Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa" dalam *Basis* No. 11-12/ November-Desember, 2003.

miskin seolah-olah menjadi representasi bahwa asal mau bekerja keras pasti bisa sukses telah mengabaikan kenyataan bahwa kesempatan, fasilitas dan akses dimiliki warga miskin dan kaya sangat timpang. Kondisi ketimpangan akses terhadap pelayanan pendidikan tersebut bertambah runyam ketika kebijakan negara pascakejatuhan Soeharto cenderung mengorientasikan pendidikan pada privatisasi dan swastanisasi. Program yang paling nyata di dunia pendidikan tinggi adalah kebijakan tentang perubahan secara bertahap status dari universitas-universitas negeri menjadi berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) telah semakin menjauhkan lapisan masyarakat yang miskin dari akses pendidikan universitas.

Kondisi seperti ini semakin memperkokoh tesisnya Bourdieu² yang menegaskan bahwa pendidikan yang terintegrasi dengan sistem ekonomi pasar bebas tersebut cenderung menjadi instrumen reproduksi kelas dan bukannya instrumen untuk mobilitas sosial. Pendidikan bukan lagi sebagai institusi untuk mengubah nasib seseorang, tetapi untuk melanggengkan posisi-posisi sosial seseorang dalam masyarakat. Individu yang tidak memiliki uang yang cukup tidak dapat masuk di universitas sehingga tetap saja menjadi miskin, sedang mereka yang berkecukupan dapat menikmati fasilitas pelayanan pendidikan universitas dan kalau lulus dapat memertahankan kelasnya atau tetap menjadi individu yang berkecukupan. Maka, keberadaan institusi pendidikan dalam masyarakat yang sedang melakukan reformasi ini justru memperkuat kesenjangan sosial antara distingsi lapisan sosial kaya dan miskin. Dengan

² Pierre Bourdieu, *Homo Academicus*, Stanford University Press, 1990.

demikian, pendidikan bukan instrumen pembebasan dalam pengertian yang luas.

Demokratisasi yang menjadi agenda reformasi politik juga tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sebelum rezim Orde Baru tumbang ada keyakinan umum yang berkembang bahwa masalah utama dari krisis multidimensional adalah sistem kekuasaan otoriter di bawah genggaman Soeharto yang sangat korup. Maka, agenda reformasi adalah merombak tatanan tersebut dengan cara melakukan demokratisasi di segala aspek kehidupan agar kesejahteraan dan keadilan sosial dapat direalisasi. Namun, dalam perjalanan setelah reformasi memasuki tahun ke sepuluh ternyata kesejahteraan sosial dan keadilan yang dicita-citakan belum kunjung tiba. Bahkan krisis ekonomi berkepanjangan masih berlangsung sehingga program demokrasi justru mengalami fase stagnasi atau para pengamat politik menyebutnya sebagai "demokrasi beku" (*frozen democracy*).³ Intinya, pada satu sisi secara formal institusi-institusi politik berkembang ke arah demokratis yang ditandai dengan partai yang semakin majemuk, ruang publik yang semakin terbuka, masyarakat sipil yang semakin menguat, hubungan parlemen dan eksekutif yang kritis, sedang pada sisi yang lain tujuan-tujuan demokrasi seperti keadilan, kesejahteraan rakyat, dan penegakan hukum masih dalam kondisi jauh panggang daripada api.

Bahkan terjadi perkembangan luar biasa dalam pemilu, dimana rakyat memilih pemimpin dari segala tingkatan secara langsung. Asumsinya adalah apabila seluruh pemimpin dari jajaran presiden, gubernur, wali kota, bupati hingga lurah dipilih langsung oleh rakyat,

³ Georg Sorensen, *Democracy and Democratization: Processes and Prospect in a Changing World*, Westview Press, 1993.

maka kebijakan yang ditelurkan akan memihak kepada kepentingan rakyat. Dengan demikian, secara otomatis kebijakan tentang pelayanan pendidikan juga akan memihak kepada rakyat sehingga tidak akan ada rakyat yang tidak mampu memperoleh pelayanan pendidikan karena persoalan kemahalan biaya. Anggaran pendidikan yang diharapkan sebesar 20 persen dari APBN juga tidak kunjung terwujud. Tampaknya terjadi sebuah paradoks, dimana sektor politik cenderung menjadi demokratis, tetapi sektor ekonomi justru terpuruk, politik uang terjadi setiap ada pemilu nasional/lokal dan korupsi merajalela dimana-mana. Dalam praktik di beberapa negara proses demokrasi tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada topangan dari sektor-sektor yang lain, terutama sektor ekonomi. Inilah suatu fenomena negara yang sedang memasuki demokrasi liberal, tetapi tidak mengerti filsafat liberalisme itu sendiri. Bahkan sangat dimungkinkan diskrepansi antara cita-cita bangsa dan kebijakan ekonomi negara sebagai cerminan ketidakpahaman elite terhadap landasan filsafat liberalisme.

Ada dua landasan filsafat liberalisme yang saat ini memengaruhi kebijakan negara-negara maju, yaitu faham demokrasi liberal John Stuart Mill berhadapan dengan pandangan liberalisme Friedrich von Hayek.⁴ Bagi Mill demokrasi adalah elemen penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang bebas dari berbagai tekanan. Faktor-faktor kebebasan dan kompetisi akan mendorong pembenahan sumber daya manusia menuju kualitas yang semakin baik. Sedang faktor partisipasi dalam kehidupan berpolitik dapat menyebabkan pengembangan kapasitas pribadi "tertinggi dan serasi". Pandangan ini menyadari bahwa warga

⁴ David Held, *Models of Democracy*, Cambridge: Polity Press, 1987, hal. 86.

negara memiliki kemampuan modal yang berbeda-beda, seperti latar belakang ekonomi dan pendidikan yang berbeda, maka negara harus melakukan fasilitasi agar tidak terjadi ketimpangan. Negara harus memberikan akses yang setara dalam hal pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga karena kalau warganya berpendidikan dan sehat asumsinya akan terjadi perbaikan kualitas sumber daya manusia yang kemudian siap berkompetisi dalam sistem yang liberal.

Inilah yang dinamakan dengan "demokrasi protektif", yaitu sebuah sistem demokrasi liberal dengan mensyaratkan proteksi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Tujuan dari demokrasi model ini adalah terjadinya kebebasan maksimum warga negara membutuhkan ruang lingkup aktivitas negara atau gabungan antara pemerintahan yang representatif dan ekonomi pasar bebas. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa demokrasi tidak dapat bergulir sendiri tanpa ada proteksi dari pemerintah, karena kalau sektor pendidikan dan kesehatan ikut diliberalkan, maka yang terjadi adalah *survival of the fittest*, siapa yang pandai dan sehat merekalah yang menang. Filsafat seperti ini tidak bertentangan dengan filsafat resmi negara kita, maka tidak ada salahnya apabila ikut mewarnai dalam kebijakan pendidikan kita. Proteksi (subsidi) oleh negara dalam hal pendidikan dan kesehatan menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban terhadap warganya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dalam pasar bebas.

Sedang pandangan Hayek⁵ menekankan bahwa demokrasi liberal adalah sebuah doktrin mengenai cara

⁵ Friedrich August von Hayek, *The Constitution of Liberty*, London: Routledge and Kegan Paul, 1960, hal. 103.

untuk menentukan bentuk hukum. Baginya demokrasi bukan hal terpenting karena tujuan tertingginya adalah kebebasan (*liberty*) yang dapat tercapai hanya jika ada batas yang tegas terhadap aktivitas pemerintah. Intervensi pemerintah dalam masyarakat sipil harus bertujuan untuk melindungi kehidupan, kebebasan dan hak milik, yang pada dasarnya berarti menciptakan kerangka terbaik bagi operasi pasar bebas. Apabila disederhanakan pesan yang ingin disampaikan oleh Hayek dalam pandangannya adalah perlunya pembatasan peran negara seminimal mungkin dalam pelayanan publik, perlindungan terhadap hak milik individu melalui hukum dan terwujudnya pasar bebas yang sempurna. Pandangan seperti ini cenderung bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 karena apabila diterapkan di Tanah Air akan semakin mendorong terciptanya ketimpangan sosial. Limitasi peran negara dalam pelayanan publik, pemberian peran seluas-luasnya pihak swasta dan perlindungan hukum atas hak milik individu cenderung hanya akan memroteksi mereka bermodal kuat untuk menjadi semakin kuat seperti yang terjadi di Tanah Air saat ini. Sektor pendidikan dan kesehatan tidak diproteksi dengan subsidi yang cukup dari negara akibatnya semakin meningkatkan kesenjangan sosial.

Reposisi hubungan negara dan warga

Sepanjang sejarah perkembangan politik di Tanah Air sejak masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi posisi warga cenderung merupakan subordinat dari negara dan di era globalisasi saat ini pasar menjadi kekuatan dominan di atas warga dan negara. Padahal, dalam konsep tata kelola pemerintahan

yang baik (*good governance*) yang dicita-citakan oleh pemerintahan reformasi terjadi hubungan dialektis tiga pilar negara, pasar dan masyarakat sipil. Idealnya, hubungan-hubungan kekuasaan tersebut akan menghasilkan transparansi, kompetisi yang sehat, partisipasi dari segala lapisan sosial dan liberasi masyarakat. Kalau kita amati isi yang tertera dalam cita-cita bangsa (Pancasila dan UUD 1945), liberalisme "demokrasi protektif" dan dasar tata kelola pemerintahan yang baik secara prinsipil tidak ada pertentangan. Namun, satu hal yang dapat ditangkap dari ide liberalisme demokrasi protektif adalah bahwa demokrasi bisa berjalan secara memadai (*liberal*) kalau beberapa sektor kehidupan diproteksi oleh negara, terutama sektor pendidikan. Sektor pendidikan menjadi instrumen untuk mencerdaskan dan membuat individu memiliki pengetahuan dan keahlian sehingga bisa masuk ke pasar bebas tenaga kerja. Dengan kata lain setiap warga negara dari lapisan sosial manapun dapat memperoleh akses pelayanan pendidikan yang memadai dan yang sesuai dengan keinginannya.

Pemerintah kita bisa saja mengambil jalur liberalisasi ekonomi, namun prinsip-prinsip demokrasi protektif seyogianya ditegakkan agar tidak terjadi ketimpangan sosial. Karena demokrasi politik tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau rakyat tidak berpendidikan. Oleh karena itu, subsidi sektor pendidikan perlu diperbesar dan upaya peningkatan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN perlu segera direalisasi dalam upaya meningkatkan akses yang merata bagi rakyat terhadap sektor ini. Apabila sebagian besar rakyat dapat mengenyam pendidikan, maka kualitas sum-

ber daya manusia Indonesia akan meningkat dan setiap individu akan siap memasuki persaingan pasar bebas. Dengan demikian, juga kualitas demokrasi politik kita akan semakin terbangun dengan mantap. ❖